

Dinas PU Klaim Proyek DAS Ampal Rampung



Sumber gambar : Kaltimpost Sabtu, 24/02/2024

Meski banyak pihak yang mengaku aneh dengan klaim proyek DAS Ampal telah rampung, Pemkot bersikeras pekerjaan tersebut sudah klir.

BALIKPAPAN - Dinas Pekerjaan Umum mengeklaim pekerjaan DAS Ampal memang sudah rampung. Sesuai kontrak, permukaan jalan dibuat hanya berbentuk *rigid pavement* atau beton. Artinya tidak ada pengaspalan. Sementara pekerjaan pengaspalan, penataan trotoar, dan perapian lainnya tidak termasuk dalam kontrak dengan Fahreza Duta Perkasa.

Begitu pula pekerjaan saluran sekunder Inhutani depan Pegadaian sampai Auto 2000 dengan panjang 225 meter. Sebelumnya dalam dokumen perencanaan proyek ini juga ikut tertuang. Namun, kabarnya tidak masuk kontrak dengan Fahreza. Melainkan proyek berlanjut tahun ini dengan lelang baru dengan kontraktor lain.

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud mengatakan, saat ini pekerjaan yang berjalan dengan Fahreza sudah rampung sesuai laporan Dinas PU. "Pekerjaan ini juga tidak langsung selesai semua. Ada tahapannya. Soal yang ini sekarang sudah klir," katanya. Dia mengakui, jalan sekarang belum mulus dan butuh pembenahan.

Sehingga penataan jalan akan bertahap lagi dengan kontraktor yang berbeda. "Selanjutnya nanti kita lihat situasi, tapi jangan sampai ini terulang lagi," ucapnya. Dia menyebutkan, proyek pengendalian banjir DAS Ampal butuh perjuangan dan pengorbanan bersama seluruh masyarakat. Semua untuk membuat kondisi kota lebih baik.

Tentu pasti ada dampak karena memperbaiki jalan eksisting. "Karena ini barang sudah jadi, tapi diperbaiki. Bukan bangun jalan baru yang mulai dari nol," sebutnya. Namun dia meyakini, masyarakat akan merasakan semua hasil pekerjaan ini. Rahmad mewakili Pemkot Balikpapan turut menyampaikan permohonan maaf kepada warga.

"Jika selama kegiatan yang harus dilakukan ini bagian dari pembenahan kota semua untuk pembangunan Balikpapan," sebutnya. Teranyar Pemkot Balikpapan berencana memberi santunan atau dana kerohiman. Saat ini masih dilakukan pendataan baik warga hingga pelaku UMKM yang terdampak proyek senilai Rp136 miliar tersebut.

Sementara itu, Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Piatur Pangaribuan menyoroti rencana bantuan tersebut. Menurut dia, kondisi proyek yang digarap Fahreza Duta Perkasa ini bentuk kegagalan pemerintah dalam mengelola proyek. Sedangkan pemerintah sekarang ingin bertanggung jawab dengan memberi kompensasi kepada warga terdampak.

"Aneh, menurut saya ini kelewatan. Seharusnya justru kontraktor yang menanggung semua. Berarti ada sesuatu yang tidak beres," ujarnya. Dia menegaskan, pihak yang melanggar kontrak selama ini yakni kontraktor. Sebab, tidak bisa menjalankan tugas dengan benar. Bahkan, terus mendapat perpanjangan waktu.

Piatur mempertanyakan kenapa pemerintah kota mau ikut menyelesaikan masalah. Terutama dari mana dasar hukum memberi bantuan dan asal anggarannya. "Logika hukumnya tidak masuk. Seharusnya kan sebaliknya, kontraktor dituntut bertanggung jawab. Jadi banyak hal dalam proyek ini yang membingungkan," pungkasnya. **(ms/k8)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Dinas PU Klaim Proyek DAS Ampal Rampung, 24/02/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Airan Sungai, daerah aliran sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
2. Dalam Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai diatur bahwa pembangunan prasarana pengendali banjir dilakukan dengan membuat:
 - a. peningkatan kapasitas sungai;
 - b. tanggul;
 - c. pelimpah banjir dan/atau pompa;
 - d. bendungan;
 - e. perbaikan drainase perkotaan.